

Peran Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak Stunting di Kecamatan Mandau

Faze Aviardi¹ Kartius²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
fazeaviardi@student.uir.ac.id kartius@soc.uir.ac.id

Received : March 7, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The nutritional status of children under five in Indonesia is still a problem, including malnutrition, malnutrition and stunting. Stunting can hamper economic growth, increase poverty and inequality in various regions, including Bengkalis Regency. The high prevalence of stunting has a negative impact on children's growth and overall public health. Therefore, a focused program is needed to handle and prevent stunting. Qualitative research is carried out in natural settings to explore related social phenomena. Qualitative research is carried out in natural settings. The reason the author uses a qualitative method is because this method describes in full and in depth the social phenomenon being studied. The researcher chose this method because it was considered the most suitable method for identifying problems regarding the implementation of the Stunting Children's Foster Care Program (BAAS). This method was chosen to identify problems in implementation Foster Father Program for Stunting Children (BAAS). The research results show that the Coordinator and Facilitator indicators are running well, but further evaluation is needed regarding the implementers, especially in terms of fulfilling human resources. Overall, the Accelerator, Coordinator and Facilitator indicators have gone quite well. The Stakeholder needs to increase the effectiveness of socialization of the BAAS Program through collaboration and coordination with other parties.

Keywords: *Implementation, Program, Father Nurturing Stunted Children*

Abstrak

Status gizi balita di Indonesia masih menjadi permasalahan, termasuk masalah gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan kesenjangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis. Tingginya prevalensi stunting berdampak negatif pada pertumbuhan anak dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan program fokus untuk penanganan dan pencegahan stunting. Penelitian kualitatif dilakukan dalam keadaan alamiah untuk mendalami fenomena sosial terkait. Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting). Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena metode ini menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti. Peneliti memilih metode ini karena dianggap sebagai metode yang paling cocok untuk mengidentifikasi masalah mengenai implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi masalah dalam implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Hasil peneliti menunjukkan bahwa indikator Koordinator dan Fasilitator berjalan baik, namun perlu evaluasi lebih lanjut terkait implementor, terutama dalam pemenuhan sumber daya manusianya. Secara keseluruhan, indikator Akselerator, Koordinator, dan Fasilitator sudah berjalan cukup baik. Pihak Stakeholder perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi Program BAAS melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain.

Kata Kunci : *Implementasi, Program, Bapak Asuh Anak Stunting*

Pendahuluan

Status gizi di Indonesia terutama pada balita yang sekarang masih menjadi permasalahan di antaranya masalah gizi kurang, gizi buruk serta Stunting. Menurut Senbanjo, Oshikoya, Odusanya, & Njokanma, 2011 (dalam Lidia 2017:131) Stunting atau biasa disebut dengan balita pendek merupakan indikasi buruknya status gizi dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak.

Status gizi di Indonesia terutama pada balita yang sekarang masih menjadi permasalahan di antaranya masalah gizi kurang, gizi buruk serta Stunting. Menurut Senbanjo, Oshikoya, Odusanya, & Njokanma, 2011 (dalam Lidia 2017:131) Stunting atau biasa disebut dengan balita pendek merupakan indikasi buruknya status gizi dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak.

Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari.

Oktarina & Sudiarti, 2014 (dalam Lidia 2017:132) Stunting (balita pendek) ketika usia balita pada umumnya tidak disadari oleh keluarga dan setelah 2 tahun baru terlihat dan berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas jangka panjang, bahkan bisa berdampak pada kematian. Sutarto (2018:540) Stunting atau perawakan pendek (shortness). suatu keadaan tinggi badan (TB) seseorang yang tidak sesuai dengan umur, yang penentuannya dilakukan dengan menghitung skor Z-indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Seseorang dikatakan stunting bila skor Z-indeks TB/U- nya di bawah -2 SD (standar deviasi). Kejadian stunting merupakan dampak dari asupan gizi yang kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tingginya kesakitan, atau merupakan kombinasi dari keduanya. Kondisi tersebut sering dijumpai di negara dengan kondisi ekonomi kurang.

Stunting dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia, tingkat produktifitas dan daya saing yang kemudian akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan.

Menurut Asiah dkk (2023:27) risiko stunting bisa terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) seseorang, dari masa kehamilan hingga usia dua tahun. Ciri-ciri stunting diantaranya : tinggi anak tidak ideal jika dibandingkan dengan anak seusianya, pertumbuhan melambat, wajah terlihat lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak berinteraksi dan melakukan kontak mata terhadap orang disekitarnya

Stunting dapat dipengaruhi oleh banyak faktor terutama riwayat terdahulu dibandingkan dengan diare yang hanya dilihat dalam waktu yang singkat. 11 Faktor lain seperti keberagaman pangan baik zat gizi makro dan mikro terdahulu juga dapat mempengaruhi keadaan stunting pada balita. Diare merupakan penyakit infeksi metabolisme yang dampaknya dapat langsung dilihat dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan keadaan stunting merupakan malnutrisi yang bersifat kronis dampak dari keadaan yang terjadi dalam waktu yang lama. badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun,

perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche (menstruasi pertama anak perempuan) dan anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.

Nirmalasari (2020:20) Stunting didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang tergolong kurang jika dibandingkan dengan umur. Pengukuran dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO, yaitu dengan interpretasi stunting jika lebih dari minus dua standar deviasi median. Balita stunting dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Umumnya berbagai penyebab ini berlangsung dalam jangka waktu lama (kronik).

Stunting patut mendapat perhatian lebih karena dapat berdampak bagi kehidupan anak sampai tumbuh besar, terutama risiko gangguan perkembangan fisik dan kognitif apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dampak stunting dalam jangka pendek dapat berupa penurunan kemampuan belajar karena kurangnya perkembangan kognitif. Sementara itu dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas hidup anak saat dewasa karena menurunnya kesempatan mendapat pendidikan, peluang kerja, dan pendapatan yang lebih baik. Selain itu, terdapat pula risiko cenderung menjadi obesitas di kemudian hari, sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain.

tercukupi, dan faktor lainnya seperti kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi sebelum kehamilan, masa kehamilan, dan setelah melahirkan. Stunting dapat dipengaruhi oleh banyak faktor terutama riwayat terdahulu dibandingkan dengan diare yang hanya dilihat dalam waktu yang singkat. 11 Faktor lain seperti keberagaman pangan baik zat gizi makro dan mikro terdahulu juga dapat mempengaruhi keadaan stunting pada balita. Diare merupakan penyakit infeksi metabolisme yang dampaknya dapat langsung dilihat dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan keadaan stunting merupakan malnutrisi yang bersifat kronis dampak dari keadaan yang terjadi dalam waktu yang lama dan terus-menerus.

Stunting memiliki dampak jangka panjang dan pendek. Dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh Stunting seperti turunya kemampuan kognitif serta prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga tubuh mudah terpapar oleh penyakit, meningkatnya risiko diabetes, penyakit jantung, obesitas, pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua. Sedangkan dampak dengan jangka pendek seperti perkembangan otak yang terganggu, berkurangnya tingkat kecerdasan, pertumbuhan fisik terganggu dan terganggunya metabolisme dalam tubuh. Jadi sudah jelas bahwa stunting tidak hanya memberikan dampak pada fisik, melainkan juga berdampak mental dan emosional, khususnya pada perkembangan kecerdasan dalam berpikir.

Pada tahun 2021 di Riau persentase balita yang pendek dan sangat pendek mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 7,30 persen menjadi sebesar 6,00 persen. Bila mengacu pada Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Riau yang menargetkan sebesar 20,00 persen di tahun 2019, maka persentase stunting atau tengkes pada

balita di Provinsi Riau pada tahun 2021 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan karena sudah berada di bawah 20 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022).

Bapak asuh di Provinsi Riau mampu turunkan angka stunting, fenomena ini tertulis di sebuah artikel infopublik.id. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengapresiasi langkah penurunan stunting yang dilakukan Provinsi Riau melalui pola “bapak asuh”. Hal tersebut disampaikan Menko Muhadjir dalam rangkaian agenda roadshow daring ke-17 di Provinsi Riau pada Kamis (9/3/2023)

Stunting menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis. Tingginya prevalensi stunting dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta kesehatan. Penyebab stunting diantaranya adalah kurangnya asupan gizi selama hamil dan kebutuhan gizi Anak tidak dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya program yang fokus pada penanganan dan pencegahan stunting.

Kabupaten bengkalis merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang mendukung program pemerintah terkait percepatan penurunan stunting, dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bengkalis.

Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) adalah gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menasar langsung keluarga berisiko stunting. Yang dimaksud dengan Elemen bangsa adalah pemangku kepentingan yang terdiri dari orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 1, Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting).

Pada asuhan pendukung kegiatan yang dilakukan berupa komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kelompok sasaran, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan lainnya. dan untuk mengukur keberhasilan dilihat berdasarkan indikator yang ada pada tabel diatas.

Tinjauan Pustaka

Dalam merumuskan suatu kebijakan yang menyangkut program dan kegiatan - kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau biasa disebut implementasi. Karena sebaik apapun suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti.

Menurut Grindle (dalam Haedar 2010:2) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan dialurkan untuk mencapai sasaran.

Jika pemahaman ini ditujukan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) (dalam Haedar 2010:2) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, menurut Sabatier (dalam Haedar:2) implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu.

Pengertian pelaksanaan seperti yang dikemukakan oleh Pariata Westra. Dkk (2009:256) adalah : "Aktivitas atau usaha- usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan".

Definisi Pelaksanaan (Implementasi) menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Riski dkk 2021:22) sebagaimana yang dikutip dalam buku Leo Agustino (2006; 139), yaitu : pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang - undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya. keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Alasan mengapa implementasi kebijakan dibutuhkan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Maka dari itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau pandangan.

Salah satu variabel dalam implementasi adalah sumber daya yang di dalamnya juga terdapat sebuah sumber daya manusia. Stakeholders adalah bentuk sumber daya manusia dalam implementasi. Menurut Kadiwaraka dalam Kismartini

(Dalam Isro' 2021:5) stakeholders adalah semua pihak baik secara individu, maupun kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian sebuah tujuan dalam suatu kegiatan. Banyak ahli yang memiliki pandangan terkait klasifikasi stakeholders.

Crosby dalam Kismartini (dalam Isro' 2021:5) membagi stakeholders menjadi tiga klasifikasi yaitu stakeholders utama, stakeholders pendukung, dan stakeholders kunci. Klasifikasi stakeholders juga dapat dilihat berdasarkan perspektif governance. Stakeholders dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Negara atau pemerintah (state),
2. Masyarakat sipil (civil society),
3. Masyarakat ekonomi (private sector).

Metode

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, mengingat peneliti membutuhkan informasi yang tepat mengenai subjek penelitiannya serta temuan analisisnya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan penjelasan yang realistis tentang bagaimana Implementasi

Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis (Studi Di Kecamatan Mandau). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting). Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena metode ini menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti. Peneliti memilih metode ini karena dianggap sebagai metode yang paling cocok untuk mengidentifikasi masalah mengenai implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa indikator Fasilitator dalam pelaksanaan Program BAAS yang dibantu oleh stakeholder telah tercukupi dengan baik. Hal ini memastikan distribusi barang berupa uang tunai atau benda yang dibutuhkan kepada keluarga yang berisiko terkena stunting dapat terlaksana dengan lancar.

Namun, terkait dengan indikator Implementor dalam pelaksanaan Program BAAS yang dibantu oleh stakeholders, meskipun implementor di tingkat Kabupaten Bengkalis sudah tercukupi dengan baik, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan terkait pemenuhan sumber daya manusianya, terutama jika ruang lingkungannya diperluas. Keberlanjutan program ini menjadi kunci untuk meningkatkan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Dengan melakukan evaluasi yang cermat, diharapkan implementasi BAAS dapat dioptimalkan sehingga lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat positif dari program ini, terutama dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau), dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, dari empat indikator yang digunakan peneliti, pengimplementasiannya dapat dianggap sudah cukup baik. Indikator Koordinator menunjukkan kinerja yang baik, di mana stakeholder berhasil mengkoordinasikan dengan efektif pihak-pihak lain yang terlibat dalam Program BAAS, seperti kerjasama dengan puskesmas di Kecamatan Mandau dan kolaborasi dengan pihak TNI untuk menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya, dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa indikator Fasilitator dalam pelaksanaan Program BAAS yang dibantu oleh Stakeholders telah tercukupi dengan baik. Hal ini memastikan distribusi barang berupa uang tunai atau benda yang dibutuhkan kepada keluarga yang berisiko terkena stunting dapat terlaksana dengan lancar.

Namun, terkait dengan indikator Implementor dalam pelaksanaan Program BAAS yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Riau, meskipun implementor di tingkat Kabupaten Bengkalis sudah tercukupi dengan baik, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan terkait pemenuhan sumber daya manusianya, terutama jika ruang lingkungannya diperluas. Keberlanjutan program ini menjadi kunci untuk meningkatkan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Dengan melakukan evaluasi yang cermat, diharapkan implementasi BAAS dapat

dioptimalkan sehingga lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat positif dari program ini, terutama dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

Terakhir, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa indikator Akselerator dalam pelaksanaan Program BAAS sudah terlaksana dengan baik. Stakeholder membuka peluang kolaborasi sebaik-baiknya dengan berbagai pihak untuk mendukung kesuksesan penurunan angka stunting di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Mandau. Kesimpulan ini memberikan gambaran positif terkait efektivitas dan sinergi dalam pelaksanaan Program BAAS di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1, 1-10.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah

kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.

- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk

Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.

- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru

Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.

- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Asiah Wasillah, I. D. (2023). Strategi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Pencegahan Stunting di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. *Jurnal JAPS*, Volume 4 No 1, 26-34.
- Beny Setiawan, H. N. (2020). ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANGKA KEMATIAN IBU STUDI KASUS KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG. 3-17.
- Dr. H Indra Muchlis Adnan, S. d. (2013). ADMINISTRASI, ORGANISASI, DAN MANAJEMEN. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Trussmedia Grafika.
- Fitri, L. (2018). HUBUNGAN BBLR DAN ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN STUNTING DI PUSKESMAS LIMA PULUH PEKANBARU. *Jurnal Endurance* 3(1), 131-137.

- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya . Hetzer, E. (2012). Central and Regional Government. Jakarta: Gramedia.
- Isro' Lailia, K. A. (2021). PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTERVENSI GIZI SENSITIF DI KOTA SEMARANG. 1- 10.
- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Khodziah Isnaini Kholif, I. N. (2014). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN DAWARBLANDONGKABUPATEN MOJOKERTO. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, 709-714.
- Kriyantono, R. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lina Marliani, M. (2018). DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG. Vol 5, No 4, 17-18.
- Moleong, L. J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Pasolong, H. (2020). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Retno Sunu Astuti, H. W. (2020). Collaborative Governance (dalam Perspektif Administrasi Publik). Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahrum, S. &. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citrapustaka Media.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022 BKKBN Provinsi Riau
- Kemkes.go.id, Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017

Regulasi:

Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN P ASTI)

Profil kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Website diskominfotik bengkalis